

## KOP SURAT KPU KABUPATEN/KOTA

Nomor : ..... (Kab/Kota) Februari 2017  
Sifat : .....  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tahapan  
Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati/Walikota dan Wakil  
Walikota Tahun 2017

---

Yth. Ketua KPU Republik Indonesia

di –

Jakarta

Sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... Tahun 2017, dengan hormat disampaikan laporan sebagai berikut:

### **A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

#### **I. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten/Kota .....**

Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota ..... adalah ..... jiwa, yang tersebar di ....

#### **II. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)**

Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan

Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota ..... adalah ..... jiwa, yang tersebar di ..... Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki... jiwa, Perempuan .... Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak .....

**Tabel I.0.....**

**Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... Tahun 2017**

No	Nama Kecamatan	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
	TOTAL					

### III. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... untuk

ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten/Kota ..... sebagaimana terlihat pada tabel ...

**TABEL II.0.....**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota .....**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
13							
14							
15							
TOTAL							

2. Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota .... Terdapat beberapa kejadian khusus dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan ..... terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa ..... yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu .....
  - b. Di Kecamatan ..... terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa ..... yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu .....
  - c. Di Kecamatan ..... terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa ..... yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu .....
  - d. Di Kecamatan ..... terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa ..... yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu .....
3. Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota ....., dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota ..... Model A1.3-KWK (Dokumen TB.00.....) dimana jumlah DPS adalah ..... Jiwa yang terdiri dari ..... Laki-laki dan ..... Perempuan, sesuai dengan Berita Acara .... Nomor ....
4. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut terdapat masukan dari PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon sebagai berikut:
- a. Masukan dari PPK ..... adalah .....
  - b. Masukan dari Panwas Kabupaten/Kota adalah .....
  - c. Masukan dari Tim Pasangan Calon ..... adalah .....
  - d. Masukan dari Tim Pasangan Calon .... adalah ....

5. Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... telah menindaklanjutinya sebagai berikut:
  - a. Terhadap masukan dari PPK telah ditindaklanjuti dengan .....
  - b. Terhadap masukan dari Panwas Kabupaten/Kota telah ditindaklanjuti dengan .....
  - c. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon .... telah ditindaklanjuti dengan .....
  - d. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon .... telah ditindaklanjuti dengan .....
6. Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak ..... . Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak .....
7. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal ..... sampai dengan .....

#### **IV. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... Nomor.... Tentang ..... adalah ..... Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten/Kota ..... dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... , sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.3-KWK (Dokumen T.....) .

2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
3. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kabupaten/Kota dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ..... diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal ..... di ..... Berita Acara Nomor ..... Tanggal ..... Tentang Rekapitulasi Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ....., Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... Nomor: ..... Tanggal ..... tentang ..... diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

**TABEL III.0.....**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota .....**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
	TOTAL						

## V. Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Bahwa terhadap DPT yang sudah diumumkan kepada masyarakat terdapat masukan/keberatan dari beberapa Pihak yaitu:
  - a. Panwas Kabupaten/Kota ..... pada tanggal ... surat Nomor .... dengan alasan .....
  - b. Tim Pasangan Calon ..... pada tanggal ..... surat Nomor .... dengan alasan .....
  - c. Tim Pasangan Calon .... Pada tanggal ..... surat Nomor ....dengan alasan ....
2. Bahwa keberatan dan/atau masukan, dapat dikelompokkan menjadi.....:
  - a. Adanya dugaan DPT ganda sebanyak ....
  - b. Adanya dugaan DPT fiktif sebanyak ....
  - c. Adanya dugaan DPT .... sebanyak ....
  - d. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak ....
  - e. Pemilih yang tidak memiliki e-KTP sebanyak ....
3. Bahwa atas keberatan dan masukan tersebut KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a.
  - b. (termasuk perbaikan dan perubahan DPT)
4. Bahwa terhadap penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota .... Pihak Panwas dan atau Tim Pasangan Calon menyatakan puas/tidak puas dengan alasan .....
5. KPU Kabupaten/Kota ..... melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal ..... di ..... dengan Berita Acara No. .... Tentang ..... dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota

..... Nomor : ..... Tentang ..... Perubahan DPT dilakukan setelah adanya rekomendasi untuk perubahan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .... Tahun .... dari Panwas Kabupaten/Kota ..... dengan Surat Nomor: ..... tanggal .....

## B. PERKEMBANGAN SENGKETA PEMILIHAN

### I. Sengketa Pemilihan di Mahkamah Agung

1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..... Nomor ..... yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon atas nama ..... maka Pasangan Calon ..... melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.
  2. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan Pemohon ..... adalah pada pokoknya sama dengan alasan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..... dan Panwas Kabupaten/Kota ....., yaitu:
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
  3. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar karena .....
- (sebutkan dasar dan bukti dokumen pendukungnya)***
4. Bahwa karena upaya hukum Kasasi Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor ..... maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ..... Nomor ....., di mana Keputusan tersebut menetapkan bahwa pasangan calon ..... dinyatakan memenuhi



syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon sedangkan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. menetapkan Pasangan Calon ..... sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ..... Tahun 2017, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi ..... Nomor.....

5. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... Tahun 2017 adalah:
  - a. .... dan .....
  - b. .... dan .....
  - c. .... dan .....

## **II. Dugaan Pelanggaran Administrasi Politik Uang**

1. Bahwa karena adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
2. Putusan Bawaslu dengan Nomor..... yang pada pokoknya permohonan Pelapor Pasangan Calon..... ditolak/ tidak dapat diterima oleh Bawaslu....., maka Pasangan Calon..... mendapatkan sanksi administrasi berupa pembatalan Pasangan Calon.
3. Bahwa Pasangan Calon yang telah diberi sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

4. Bahwa dasar upaya hukum Kontra Memori Keberatan yang diajukan Pelapor ..... adalah pada pokoknya dengan alasan yaitu:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
5. Bahwa dasar upaya hukum Kontra Memori Keberatan yang diajukan oleh Pelapor tidak berdasar karena .....  
**(sebutkan dasar dan bukti dokumen pendukungnya)**
6. Bahwa karena upaya hukum Kontra Memori Keberatan Pelapor dikabulkan oleh Bawaslu, ..... maka KPU Kabupaten/Kota ..... menetapkan Pasangan Calon ..... sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Provinsi ..... dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Provinsi..... Tahun 2017, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota ..... Nomor..... tanggal .....
7. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota ..... Tahun 2017 adalah:
  - a. .... dan .....
  - b. .... dan .....
  - c. .... dan .....

### III. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepada DKPP

1. Bahwa Pasangan Calon ..... dan ..... (selaku Pengadu) telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) pada tanggal ..... yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota ....., yaitu:

- a. .... selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- b. .... selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- c. .... selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- d. .... selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- e. .... selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota

2. Bahwa tuduhan pelanggaran etika tersebut adalah mengenai diloloskan atau tidaknya Pasangan Calon ..... dengan alasan menurut Pengadu adalah .....

**(sebutkan alasan dan dokumen pendukungnya. Tuduhan bisa diajukan dari Pasangan Calon yang tidak puas karena KPU menilai Calon tersebut tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, atau bisa juga diajukan oleh Pasangan yang lolos namun mempersoalkan Calon lain yang dianggap tidak memenuhi persyaratan akan tetapi diloloskan oleh KPU)**

3. Bahwa tuduhan Pengadu tidak berdasar karena .....

**(sebutkan alasan dan dokumen pendukungnya)**

4. Bahwa menghadapi tuduhan pelanggaran kode etik tersebut KPU Kabupaten/Kota ..... telah menyiapkan alat bukti berupa:

- a. Surat yang meliputi dokumen ....., mengenai ..... dan dokumen ..... mengenai .....

- b. Saksi yaitu:

- 1) ....., yang menerangkan .....

- 2) ....., yang menerangkan .....

- c. Ahli yaitu:
- 1) ..... , yang menerangkan .....
  - 2) ..... , yang menerangkan .....
5. Bahwa pada tanggal ..... DKPP telah membuat putusan yang pada pokoknya mengabulkan/menolak laporan dari Pengadu.
  6. Bahwa karena laporan dari Pengadu ..... Diterima dan DKPP memutuskan untuk ..... maka KPU Kabupaten/Kota ..... melaksanakan putusan DKPP dengan cara.....

### **C. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

1. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota ..... tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di ..... TPS, yang tersebar pada ..... desa/kelurahan dan ..... kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah TPS di Kecamatan ..... adalah sebanyak ..... TPS
  - b. Jumlah TPS di Kecamatan ..... adalah sebanyak ..... TPS
  - c. Jumlah TPS di Kecamatan ..... adalah sebanyak ..... TPS
  - d. Jumlah TPS di Kecamatan ..... adalah sebanyak ..... TPS
  - e. Jumlah TPS di Kecamatan ..... adalah sebanyak ..... TPS
2. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota ....., Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ..... sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.

3. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus yaitu :
  - a. Pada TPS ..... kelurahan/desa ..... kecamatan .....  
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
  - b. Pada TPS ..... kelurahan/desa ..... kecamatan .....  
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
  - c. Pada TPS ..... kelurahan/desa ..... kecamatan .....  
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
  - d. Pada TPS ..... kelurahan/desa ..... kecamatan .....  
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
  - e. Pada TPS ..... kelurahan/desa ..... kecamatan .....  
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)

*(Mohon jelaskan apabila ada kejadian khusus lainnya)*

#### D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di ..... kecamatan dalam wilayah Kabupaten ..... mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam.
  
2. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan ..... Kabupaten ..... Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
  - b. Kecamatan ..... Kabupaten ..... Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
  - c. Kecamatan ..... Kabupaten ..... Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat

masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)

- d. Kecamatan ..... Kabupaten ..... Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
  - e. Kecamatan ..... Kabupaten ..... Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten ..... telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten/kota, pada umumnya dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten ....., sebagai berikut :
- a. .... Saksi Pasangan Calon ..... dan .....(Nomor urut 1)
  - b. .... Saksi Pasangan Calon ..... dan .....(Nomor urut 2)
  - c. .... Saksi Pasangan Calon ..... dan .....(Nomor urut 3)
  - d. .... Saksi Pasangan Calon ..... dan .....(Nomor urut 4, dst)
  - e. .... Panwas Kabupaten .....

4. Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten ..... diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Nomor urut 1, memperoleh ..... suara.
  - b. Nomor urut 2, memperoleh ..... suara.
  - c. Nomor urut 3, memperoleh ..... suara.
  - d. Jumlah DPT .....
  - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih .....
  - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih .....
  - g. Jumlah DPTb .....
  - h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih .....
  - i. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih .....
  - j. Jumlah DPPh .....
  - k. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih .....
  - l. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih .....
  - m. Jumlah suara sah .....
  - n. Jumlah suara tidak sah .....
  - o. Jumlah surat suara .....
  - p. Jumlah Surat Suara yang rusak .....
  - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan .....
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan .....
  
5. Pada umumnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
  
6. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten yaitu:
  - a. Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya



rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)

- b. Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
- c. Terdapat kejadian khusus berupa ..... (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)

Demikian laporan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota .....

(Kabupaten/Kota)....., ..... 2017

KPU Kabupaten/Kota .....

Ketua,

**(Tandatangan)**

**(Nama Jelas)**

### LAMPIRAN I

**DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA KABUPATEN/KOTA ..... DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN/KOTA .....**

NO.	MODEL	JUDUL	KETERANGAN	KODE
<b>A.</b>	<b>DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)</b>			
	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota		T.....
<b>C.</b>	<b>DAFTAR PEMILIH TETAP</b>			
	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota		T.....
<b>D.</b>	<b>DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)</b>			
<b>E.</b>	<b>DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)</b>			

### DAFTAR DOKUMEN PERKEMBANGAN SENGKETA PEMILIHAN

No.	Nama Dokumen	Keterangan
-----	--------------	------------

1		
2		
3		
4		
5		

**DAFTAR DOKUMEN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN  
REKAPITULASI SUARA**

NO.	MODEL	JUDUL	KETERANGAN	KODE
<b>A.</b>	<b>PEMUNGUTAN SUARA</b>			
1				T.....
2				T.....
<b>B.</b>	<b>PENGHITUNGAN SUARA</b>			
3				T.....
<b>C.</b>	<b>REKAPITULASI SUARA</b>			
				T.....

**CATATAN**

- 1. Format laporan ditulis dengan Font: Arial 12, spasi 1,5 , ukuran A4, menggunakan nomor halaman terletak di atas tengah, dengan jarak margin ke sisi kertas baik bagian kiri, kanan, atas, maupun bawah adalah 3 cm atau 1,2 pt**
- 2. Soft copy dikirim dalam bentuk Microsoft Word versi 97-2003 doc atau RTF (Rich Text Format)**
- 3. Daftar dokumen pada lampiran dibuat lengkap sesuai dengan data yang disajikan pada laporan**
- 4. Dokumen lampiran disajikan dalam bentuk scan, PDF, atau JPEG**
- 5. Laporan dan lampirannya dikirim melalui email dengan alamat email [aps.hukum@gmail.com](mailto:aps.hukum@gmail.com) dengan tembusan kepada alamat email KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan**
- 6. Laporan yang diisi secara tidak lengkap, tidak sesuai dengan format dan/atau tidak benar harus segera diperbaiki sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sampai laporan dinilai lengkap dan benar. Pada bagian format yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan pelaksanaan pemilihan maka format tersebut dihapus/ditiadakan.**